

## Belanja Modal- Telan APBN “Jumbo”, Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi SPAM di Wajo Mandek



Kegiatan galian tanah proyek pembangunan jaringan perpipaan SPAM di jalur dua Jalan Sawerigading, Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo menguasai setengah jalan dan tanpa garis pengaman, Kamis, 18 April. (FOTO: IMAN SETIAWAN P/FAJAR)

Sumber gambar:

<https://harian.fajar.co.id/2024/04/21/telan-apbn-jumbo-proyek-pembangunan-jaringan-irigasi-spam-di-wajo-mandek/>

Pembangunan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Wajo dipertanyakan. Sudah sebulan lebih proyek puluhan miliar tersebut mandek.

Diketahui proyek dengan nilai pagu Rp34.724.000.000 di APBN 2023, dilaksanakan oleh PT. RIS Putra Delta. Perusahaan asal Kota Surabaya, Jawa Timur.

Terdapat 11 item pekerjaan utama dalam proyek ini. Diantaranya, galian tanah jaringan perpipaan di sejumlah ruas jalan. Salah satunya di jalur dua Jalan Sawerigading, Sengkang Kecamatan Tempe.

Warga setempat, Andi Misbahuddin (31) menyampaikan, keberadaan pipa besar di jalan raya mengganggu dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Dikarenakan di beberapa titik lokasi kegiatan, tidak diberikan garis pengaman. Garis pengaman itu, kata dia bertujuan membatasi suatu area dengan tujuan tertentu. Fungsi pemasangan untuk memberi peringatan.

“Tanah galiannya disimpan hampir separuh jalan. Kemudian tidak ada penanda kegiatan proyeknya, bisa-bisa pengendara dirugikan,” ujarnya kepada FAJAR, Kamis, 18 April kemarin.

Dia menyampaikan, kegiatan galian tanah dan penanaman pipa, terakhir kali terlihat bekerja sebelum memasuki bulan Ramadan di depan perumahan Sutera Mas. “Setelah itu (bulan Ramadan, red) tidak ada mi alat excavator bekerja sampai sekarang. Pipa berdiameter ratusan milimeter (mm) itu dibiarkan tinggal di jalan,” ucapnya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Dalam penelusuran, proyek jumbo tersebut merupakan milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulsel, Kementerian PUPR. Pembangunan jaringan perpipaan SPAM guna memenuhi kebutuhan infrastruktur air bersih untuk air minum di kawasan Sengkang, dengan memanfaatkan Danau Tempe.

Kepala BPPW Sulawesi Selatan, Kusworo Darpito dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Air Minum Satker PPPW I Sulsel, Jansen Victor hendak dikonfirmasi tidak memberikan jawaban, atas tidak berlanjutnya pekerjaan proyek yang menelan anggaran jumbo ini.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Wajo, Andi P Rukka menuturkan, pembangunan jaringan perpipaan tersebut rangkaian program Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA).

Program tersebut sebagaimana diamanatkan pemerintah dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025, capaian akses aman air minum ditargetkan sebesar 100 persen pada tahun 2024. "Makanya program WTP ini menggunakan APBN dan dilaksanakan secara bertahap dan kita harapkan target tercapai 100 persen di akhir tahun ini," tutupnya. (man)

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

*Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa*

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

### 3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

#### Sumber Berita:

1. <https://harian.fajar.co.id/2024/04/21/telan-apbn-jumbo-proyek-pembangunan-jaringan-irigasi-spam-di-wajo-mandek/>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

#### Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

